

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

Felia Putri Arinda
175310698

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulisan proposal ini dapat terselesaikan dengan judul “**Analisis *Value for Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Riau**”, guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Firdaus Ar, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy Hatta, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis terima dapat berguna dikemudian hari dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
6. Kepada Kedua Orang Tua atas segala kasih sayang, dukungan, perhatian, serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya.

7. Kepada teman-teman *se-circle* yang selalu dengan sabar membantu, mengajarkan, dan memberikan semangat moral kepada penulis untuk tetap berusaha menyelesaikan studi ini dengan baik, dan tak lupa juga untuk teman-teman seperjuangan khususnya Akuntansi Kelas B (2017) atas canda tawa, suka duka yang sudah dilewati bersama selama kurang lebih 4 tahun ini.
8. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan sarann yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 16 April 2021

Felia Putri Arinda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau melalui prinsip *value for money*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Data yang diminta berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 belum memenuhi prinsip *value for money*. Pada tahun 2018, ada 9 program dan 34 kegiatan yang dilakukan, namun hanya ada 1 dari 34 kegiatan (2,94%) yang memenuhi 3 elemen *value for money*. Pada tahun 2019, terdapat 10 program dengan 41 kegiatan yang dilakukan, namun hanya ada 2 dari 41 kegiatan (4,88%) yang memenuhi 3 elemen *value for money*. Sebaiknya kepala dinas lebih serius lagi dalam mengoptimalkan kegiatan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

Kata kunci: ekonomis, efisiensi, efektivitas, *value for money*, kinerja

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance accountability of the Riau Province Library and Archives Service through the principle of value for money. This research is a qualitative research. This study uses documentation as a technique and data. The data requested is the performance report of Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau 2018 and 2019. The data analysis technique is descriptive analysis.

The results of this study indicate that the performance accountability of the Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau in 2018 and 2019 has not met the principle of value for money. In 2018, there were 9 programs and 34 activities carried out, but only 1 out of 34 activities (2.94%) fulfilled the 3 elements of value for money. In 2019, there were 10 programs with 41 activities carried out, but only 2 out of 41 activities (4.88%) fulfilled the 3 elements of value for money. It is better if the head of the department is focusing more on optimizing the activities that have been determined. Thus the performance accountability of Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau has not met the principle of value for money.

Keywords: *economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	12
2.1 Telaah Pustaka	12
2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	12
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja	13
2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan	14
2.1.4 Aspek – Aspek Pengukuran Kinerja	15
2.1.5 Keuntungan Pengukuran Kinerja	16
2.1.6 Satuan dan Kriteria Ukuran Kinerja.....	18
2.1.7 Pengertian Indikator Kinerja.....	18
2.1.8 Penentuan indikator Kinerja.....	19
2.1.9 Pengertian Organisasi Sektor Publik.....	21
2.1.10 Pengertian <i>Value for Money</i>	22
2.1.11 Implementasi Konsep <i>Value for Money</i>	24
2.1.12 Penelitian Terdahulu	25
2.2 Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Objek Penelitian.....	28
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	28
3.3.1 <i>Value for Money</i>	28
3.3.2 Kinerja Keuangan	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32

3.4.1 Jenis Data	32
3.4.2 Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
4.2 Analisis <i>Value for Money</i>	36
4.3 Pembahasan	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
UCAPAN TERIMA KASIH DIKUTKAN DALAM PENELITIAN DOSEN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	5
Tabel 1.2 Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2018	38
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2019	40
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Ekonomis Dinas Tahun 2018	43
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Ekonomis Dinas Tahun 2019	8
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Efisiensi Dinas Tahun 2018	51
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efisiensi Dinas Tahun 2019	53
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Dinas Tahun 2018	58
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Dinas Tahun 2019	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Strktur Organisasi Dinas	1
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. (Presiden Republik Indonesia , 1999). Pelaksanaan akuntabilitas kinerja ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan pemerintah dalam satu periode sudah terlaksana dengan baik. Untuk dapat melihat apakah kinerja pemerintah telah terlaksana dengan baik, maka dilakukan penilaian kinerja.

Laporan kinerja instansi akan di reviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan melihat apakah kinerja yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh satuan kerja pemerintah daerah. (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2014). Penilaian kinerja dimulai dengan membuat perjanjian kinerja yang dibuat antara pemerintah tertinggi provinsi dengan satuan kerja pemerintah daerah. Setelah dilaksanakan kinerja, satuan kinerja pemerintah daerah akan membuat laporan kinerja instansi yang berisi tentang capaian kinerja dalam tahun tersebut dan membandingkannya dengan perjanjian kinerja untuk melihat apakah capaian kinerja tahun ini sudah memenuhi perjanjian. Laporan kinerja instansi kemudian akan di reviu oleh Aparat Pengawasan Intrern Pemerintah untk dievaluasi. Hasil evaluasi laporan kinerja menjadi bukti apakah kinerja pemertintah telah berjalan

baik. Salah satu cara untuk melihat apakah kinerja pemerintah telah berjalan dengan baik adalah dengan menerapkan konsep *Value For Money*.

Menurut Mardiasmo (2009), *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Purwiyanti, 2017). Konsep ini dapat membantu sektor publik dalam mengukur kinerjanya yang nantinya berdampak dalam menyempurnakan pelayanan publik agar sesuai prosedur yang telah diterapkan dan meminimalisir dana alokasi belanja supaya tidak terjadi pemborosan.

Mardiasmo (2009) mengatakan manfaat dari pengimplementasian konsep *value for money* pada organisasi sektor publik adalah dapat meningkatkan pelayanan publik agar lebih tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, meningkatkan efisiensi biaya pelayanan publik, pengalokasian belanja yang lebih ke arah kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Septariani, 2016). Untuk masing-masing elemen, terdapat perbedaan cara penilaian. Elemen ekonomis dihitung dengan membandingkan nilai realisasi anggaran dengan anggarannya, elemen efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan dengan persentase nilai ekonominya, elemen efektivitas dihitung dengan membandingkan persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dengan persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan (Dwinanda, 2018). Konsep *value for money* diterapkan dengan menghitung nilai masing-masing elemen dengan cara membandingkan nilai-nilai yang berhubungan dengan kinerja. Hasil

dari perhitungan masing-masing elemen akan dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk melihat seberapa efektif, efisien, dan ekonomis kinerja yang telah dilakukan oleh Instansi. Hasil perhitungan konsep *value for money* akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kinerja Instansi pemerintah.

Salah satu instansi pemerintah adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka (Kementrian Hukum dan HAM, 2007). Sedangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kementrian Hukum dan HAM, 2009).

Setiap tahunnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau membuat program dan kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi untuk masing-masing program yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018 dan 2019

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 (dalam Rupiah)

No	Program	2018		2019	2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.248.028.200	4.000.011.918	94.16	

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 (dalam Rupiah) (Lanjutan)

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	374.042.000	256.246.245	68.51
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.500.000	6.000.000	70.59
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	112.170.000	92.530.000	82.49
5	Program Pengembangan Perpustakaan	835.849.900	579.876.300	69.38
6	Program Pembinaan Perpustakaan	12.078.000	11.068.600	91.64
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	543.085.400	362.668.732	66.78
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	261.121.900	189.037.100	72.39
9	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	82.400.000	60.216.000	73.08
Jumlah Belanja		6.477.275.400	5.557.654.895	85,80
No	Program	2019		(%)
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.505.593.000	4.131.575.012	91,70
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	332.692.000	283.067.058	85,08

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 (dalam Rupiah)
(Lanjutan)

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.500.000	6.500.000	76,47
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.000.000	108.210.000	87,27
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.930.000	84.347.200	99,31
6	Program Pengembangan Perpustakaan	655.985.100	519.396.544	79,18
7	Program Pembinaan Perpustakaan	104.528.000	81.504.100	77,97
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	376.294.000	325.293.330	86,45
9	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	165.000.000	153.066.800	92,77
10	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	65.000.000	64.811.000	99,71
Jumlah Belanja		6.422.522.100	5.757.771.044	89,65

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Menurut laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau periode 2018 dan 2019, realisasi pengeluaran keuangan untuk masing – masing yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Riau selama ini lebih kecil dari target yang dianggarkan. Pada tahun 2018, terdapat 9 program yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Perpustakaan, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dan Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan. Pada tahun 2019, terdapat 10 program yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, Program Pengembangan Perpustakaan, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dan Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Tidak terdapat realisasi anggaran penuh pada tahun 2018 dan 2019. Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 adalah pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan presentasi sebesar 94,61% dan Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan dengan presentasi sebesar 99,71%. Sedangkan program dengan realisasi anggaran terendah pada tahun 2018 dan 2019 adalah Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan dengan presentase sebesar 66,78% dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan persentase sebesar 76,47%. Banyaknya program yang tidak tercapai targetnya pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau belum terserap dengan optimal.

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau kemudian diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Riau untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja instansi. Berikut Laporan Penilaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1.2
Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Periode 2018 dan 2019

NO	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,69	30	22,83
2	Pengukuran Kinerja	25	11,25	25	14,06
3	Pelaporan Kinerja	15	9,93	15	9,81
4	Evaluasi Kineja	10	1,54	10	2,54
5	Capaian Kinerja	20	16,06	20	13,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,47	100	62,75
Tingkat Akuntanbilitas Kinerja			B		B

Sumber : (Inspektorat Provinsi Riau, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, penilaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau periode 2018 dan 2019 mendapatkan predikat B (Baik). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

berhasil menaikkan nilai sebesar 0,28 yang mana sebelumnya pada tahun 2018 nilai hasil evaluasi yang diperoleh adalah 62,47 sedangkan pada tahun 2019 nilai hasil evaluasi yang diperoleh sebesar 62,75.

Meskipun, realisasi dari anggaran selama ini lebih kecil dari target anggaran dan penilaian kinerja instansi pemerintah mendapatkan predikat B (Baik), hal itu belum menjamin bahwa pengeluaran tersebut sudah efektif dan efisien. Realisasi anggaran 2018 dan 2019 yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran masih belum terserap maksimal. Untuk melihat apakah pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah ekonomis, efektif dan efisien, maka dibutuhkan pengukuran kinerja. Salah satu cara dalam mengukur dan mengatur kinerja keuangan sektor publik adalah dengan menerapkan *value for money*.

Value for money dibutuhkan agar pengeluaran dapat digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang telah dibuat. Pengeluaran yang dimanfaatkan sebaik – baiknya akan memberikan *output* yang baik sehingga akan memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2019 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis ?
2. Bagaimana kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2019 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi ?
3. Bagaimana kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2019 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai 2019 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis.
2. Untuk mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2018 sampai 2019 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi.
3. Untuk mengukur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2018 sampai 2019 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai sarana yang tepat dalam menerapkan teori akuntansi dan yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta dapat berbagi ilmu pengetahuan yang berfokus dengan masalah konsep *value for money*.

2. Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tentang penilaian.

3. Peneliti lainnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan atau inspirasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti kasus serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang pengertian atau definisi yang diambil dari kutipan buku yang terkait dengan penyusunan proposal. Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka tersebut, akan dihasilkan proposisi (pernyataan-pernyataan hipotetikal) yang biasa disebut dengan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, obyek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPTOSIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Sedangkan menurut Mangkunegara (2016) kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang dicapai berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan, serta kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diperoleh, perusahaan dapat mengukur tingkat keberhasilannya (Pratama & Mukzam, 2018). Menurut Fahmi (2014), mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Indonesia) atau GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dan lainnya (Sipahelut, Murni, & Rate, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan kinerja keuangan merupakan gambaran yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar, dan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setiap instansi atau perusahaan memiliki standar maupun kriteria tersendiri untuk menentukan apakah kinerja tersebut berhasil atau tidak. Jika

kinerja tersebut berhasil melampaui standar maupun kriteria yang ditentukan maka kinerja keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika kinerja keuangan dalam suatu instansi tidak berhasil mencapai kriteria yang sudah ditentukan maka perusahaan atau instansi tersebut telah gagal dalam mengupayakan kinerja keuangannya.

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan, berupa aktivitas, proyek, fungsi, atau kebijakan, yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sulisworo, 2009). Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*) (Sulisworo, 2009).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan oleh organisasi dalam menilai apakah kinerja organisasi telah berjalan dengan baik dan semestinya.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Handoko A Hastthoro (2016) secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi agar mencapai *good congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan penekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Putri, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum ada 4 tujuan sistem pengukuran kinerja. Namun, setiap instansi atau perusahaan memiliki tujuan sistem pengukuran kinerja masing-masing yang mana dari 4 tujuan diatas dapat dikembangkan kembali sesuai dengan latar belakang perusahaan dan instansi tersebut.

2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Ada 3 macam pengukuran kinerja keuangan, yaitu :

1. Ukuran Kinerja Tunggal

Ukuran kriteria tunggal (*single criteria*) adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kelemahan apabila kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerja yaitu orang yang akan cenderung memusatkan usahanya pada kriteria pada usaha tersebut sehingga akibatnya kriteria lain diabaikan.

2. Ukuran Kriteria Beragam.

Ukuran kriteria beragam (*multiple criteria*) adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kriteria manajer. Tujuan penggunaan beragam ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja.

3. Ukuran Kriteria Gabungan

Ukuran kriteria gabungan (*composite criteria*) adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, lalu ukuran tersebut diperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan bobot tersebut dihitung rata-ratanya yang nanti akan dijadikan sebagai ukuran utama dalam melihat kinerja manajer (Efriyanti, Anggraini, dan Fiscal, 2012).

2.1.4 Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja

Menurut Mohammand (2009), pengukuran kinerja meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan (*input*): segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*): ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*): sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*); sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan negative.
6. Kelompok dampak (*impact*); pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif (Rempowatu & Tirayoh, 2016).

2.1.5 Keuntungan Pengukuran Kinerja

Berikut merupakan keuntungan dari pengukuran kinerja.

1. Pengukuran kinerja memberikan pendekatan terstruktur untuk fokus pada perencanaan strategis, tujuan, dan kinerja.
2. Pengukuran tersebut memberikan mekanisme pelaporan program kinerja pada manajemen yang lebih tinggi. Pengukuran kinerja memfokuskan pada perhatian tentang apa yang harus diselesaikan dan mengarahkan organisasi untuk berkonsentrasi pada waktu, sumber daya dan energi dalam mencapai sasaran. Jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi dapat melakukan analisis kesenjangan kinerja dan membuat penyesuaiannya.
3. Pengukuran kinerja akan meningkatkan komunikasi internal diantara staf dan mahasiswa, sebagaimana secara eksternal antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Penekanan dalam pengukuran dan peningkatan kinerja akan menciptakan iklim baru yang mempengaruhi semua pihak dalam memandang organisasi.
4. Organisasi perguruan tinggi yang berorientasi pada hasil membutuhkan informasi yang akurat dalam program dan layanan pendukung baik di fakultas, program studi, maupun lembaga dan biro yang berperan serta memberikan layanan akademik yang berkualitas. Pengumpulan dan pengolahan informasi yang akurat tergantung pada keefektifan komunikasi aktivitas kritis pada pencapaian misi.
5. Pengukuran kinerja menunjukkan atau mendemonstrasikan akuntabilitas perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga Pemangku kepentingan lain.

6. Pengukuran kinerja dapat menurunkan emosi dan mendorong pemecahan masalah secara konstruktif. Pengukuran memberikan data konkrit yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan baik, tidak hanya berdasar Intuisi saja.
7. Pengukuran kinerja meningkatkan pengaruh suatu hal dengan pengukuran dapat diidentifikasi wilayah wilayah membutuhkan perhatian dan memungkinkan pengaruh positif pada wilayah tersebut.
8. Perbaikan tidak akan mungkin dilakukan tanpa pengukuran kinerja. Jika organisasi tidak mengetahui posisi saat ini, maka tidak mungkin dapat ditentukan akan berada di mana, dan akan menjadi seperti apa. Organisasi butuh peta untuk dapat menentukan orientasi ke depan (Sulisworo, Pengukuran Kinerja, 2009).

Efriyanti, Anggraini, dan Fiscal (2012), mengatakan manfaat dari penilaian kinerja keuangan adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

5. Sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.

Tujuan ukuran kinerja ini selaras dengan manfaatnya. Dengan tercapainya tujuan, maka manfaat dapat dirasakan oleh organisasi.

2.1.6 Satuan dan Kriteria Ukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang efektif akan memungkinkan organisasi untuk mengetahui:

1. Seberapa baik organisasi berjalan
2. Apakah organisasi telah mencapai tujuan
3. Apakah para pengguna layanan perguruan tinggi merasa puas
4. Apakah proses yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Apakah ada perbaikan dalam sistem perguruan tinggi dan dimana

Pengukuran kinerja memberikan pada manajemen informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan yang cerdas tentang apa yang perguruan tinggi lakukan. Pengukuran kinerja merupakan gabungan dari angka dan satuan. Angka memberikan gambaran seberapa besar dan satuan memberikan makna atas angka tersebut. Ukuran kinerja ini selalu dan harus dikaitkan dengan tujuan atau sasaran atau target tertentu (Sulisworo, 2009).

2.1.7 Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Kristiyanti, 2012).

Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) (Dwinanda,2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, indikator kinerja merupakan hal-hal atau kriteria baik itu dalam kualitatif maupun kuantitatif untuk mengukur kinerja dalam sebuah pelaksanaan strategi yang sudah ditentukan.

2.1.8 Penentuan Indikator Kinerja

Furtwengler (2002) mengungkapkan bahwa ada sejumlah aspek yang dapat dijadikan indikator kinerja, yaitu:

1. Kecepatan

Hal ini terkait dengan pemahaman mengenai pentingnya kecepatan dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan, penyelesaian pekerjaan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, serta berusaha menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.

2. Kualitas

Unsur kualitas meliputi: bangga dengan pekerjaannya, melakukan pekerjaan dengan benar, dan berusaha meningkatkan kualitas pekerjaannya.

3. Layanan

Layanan dapat dilihat melalui hal-hal berikut: pemahaman pentingnya melayani pelanggan, menunjukkan keinginan untuk melayani dengan baik, merespon pelanggan dengan tepat waktu, dan kemampuan memberikan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan oleh pelanggan.

4. Nilai

Paling tidak ada dua hal yang tercakup dalam aspek nilai, yaitu tindakan yang mengindikasikan pemahaman konsep nilai dan menjadikan nilai sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

5. Keterampilan Interpersonal

Hal ini dapat ditinjau dari hal-hal: menunjukkan empati, memberikan semangat kepada orang lain, bersedia membantu orang lain, dan merespon keberhasilan orang lain dengan tulus.

6. Mental Sukses

Memiliki sikap *can do* (keyakinan untuk dapat melakukan apapun), berusaha untuk menambah pengetahuan, berusaha untuk memperbanyak pengalaman, dan realistis dalam mengukur kemampuan.

7. Terbuka dengan Perubahan

Indikator ini menjelaskan bahwa seseorang bersedia menerima perubahan, menunjukkan tindakan yang mengindikasikan rasa ingin tahu, dan memandang penting perannya dalam organisasi.

8. Kreativitas

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan melihat hubungan antar masalah, kemampuan membuat konsep kemudian mengimplementasikannya, dan kemampuan berkreaitivitas dalam rutinitas pekerjaannya.

9. Keterampilan Berkomunikasi.

Indikator ini menyangkut: kemampuan menyampaikan gagasan, kemampuan menyatakan ketidaksetujuan, kemampuan menulis, serta kemampuan menggunakan kalimat yang bernada optimis/positif.

10. Inisiatif

Inisiatif pegawai berkaitan dengan kesediaan membantu, keinginan terlibat dalam kegiatan baru, berusaha mengembangkan keterampilan dan membuat ide untuk memperbaiki kinerja.

11. Perencanaan dan Organisasi

Kemampuan seseorang dalam membuat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan, dan kemampuan menggunakan pendekatan terbaik dalam memulai tugasnya. (Prihono, Budiarta, & Astika, 2016).

2.1.9 Pengertian Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi satuan kerja/satuan organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan (Dewi, 2007).

Menurut Lijan Poltak (2012), organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum, penyedia barang atau jasa kepada

publik yang dibayar melalui pajak, retribusi dan pendapatan Negara lainnya yang diatur melalui undang-undang. Organisasi sektor publik bisa tidak lepas dari pemerintahan maka organisasi sektor publik identik dengan pemerintah. Meskipun sesungguhnya area organisasi sektor publik lebih luas dari sekedar pemerintahan (Putri & Isharijadi, 2014).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi pelayanan publik yang melayani kepentingan umum dengan cakupan masyarakat luas. Organisasi sektor publik tentunya akan selalu berkaitan dengan pemerintah.

2.1.10 Pengertian *Value For Money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Haryanto, Arifuddin, & Sahmuddin, 2007). *Value for Money* adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik di mana kinerja organisasi sektor publik tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama sama (Arifani, Salle, & Rante, 2018). Menurut Halim et al. (2014), *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi, dimana ekonomis terkait sejauh mana organisasi sektor publik meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu dan efektivitas tingkat pencapaian

hasil program dengan target yang ditetapkan (Wuwungan, Tinangon, & Rondonuwu, 2019). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *value for money* adalah salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik dengan memperhatikan *input*, *output*, dan *outcome* sebagai dasar perhitungan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi kinerja.

Indikator pengukuran kinerja dalam konsep *value for money* ada tiga, yaitu :

1. Ekonomis : Menurut Mardiasmo (2009), Ekonomis merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk melihat sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Trilaksono & Handayani, 2020). Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya (Arifani, Salle, & Rante, 2018). Ekonomis adalah hemat atau tepat guna (Laoli, 2019).
2. Efisiensi : Menurut Mardiasmo (2009), Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Trilaksono & Handayani, 2020). Efisiensi artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal (Arifani, Salle, & Rante, 2018). Efisiensi adalah output tertentu untuk dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah - rendahnya (Laoli, 2019).
3. Efektivitas : Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas merupakan perbandingan outcome, berupa pencapaian hasil program, dengan output,

berupa target pencapaian yang telah ditetapkan (Trilaksono & Handayani, 2020). Efektivitas artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran (Arifani, Salle, & Rante, 2018). Efektivitas adalah kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Laoli, 2019).

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (Haryanto, Arifuddin, & Sahmuddin, Akuntansi Sektor Publik, 2007) Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

2.1.11 Implementasi Konsep *Value for Money*

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas public. Implementasi konsep *value for money* ini diyakini dapat memperbaiki akuntansi sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Haryanto, Arifuddin, & Sahmuddin, Akuntansi Sektor Publik, 2007).

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel yang berisi penelitian terdahulu mengenai *value for money*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Zeni Amilia Putri (2020)	Analisis <i>Value For Money</i> pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Deskriptif Kualitatif	Analisis <i>value for money</i> pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap program kesehatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, dan program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan dari tahun 2016 – 2018 dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang efektif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	(Enre, 2020) (2020)	Analisis <i>Value for Money</i> Pada Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (Periode 2014-2018)	Deskriptif	Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Kota Medan selama tahun 2014-2018 belum ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomis yaitu 79% dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi kurang efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 99,71% . Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,49% yang mana berada dalam kategori cukup efektif.
3	Yosie Dwinanda (2018)	Analisis <i>Value for Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Deskriptif Komparatif	Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari seluruh kegiatan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan kinerja yang ekonomis, cukup efisien, dan kurang efektif.

Hasil penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam menyusun kerangka yang berkaitan dengan informasi yang ada dalam penulisan ini.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan Telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu:

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara data diperoleh lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Peneliti menggunakan metode ini karena bermaksud untuk mengetahui kinerja sistem keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, serta apakah kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sudah efektif dan efisien.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 462, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

3.3. Definisi Variabel Penelitian

3.3.1 *Value For Money*

Value for money adalah metode untuk mengukur apakah sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan sudah mengelola kinerja keuangan dengan baik sesuai dengan 3 elemen dalam *value for money* yaitu Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi. Berikut cara mengukur kinerja keuangan dengan metode *value for money* adalah :

A. Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2002), cara mengukur tingkat ekonomis adalah :

$$Ekonomis = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran

Angka input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Nilai Input : Anggaran

Angka nilai input yang dimaksud adalah angka target anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Menurut Mahsun (2006), dalam (Dwinanda, 2018) kriteria ekonomis adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis atau sangat ekonomis
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis

B. Efisiensi

Efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efisien menyangkut pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu (Purwiyanti, 2017).

Menurut Mardiasmo (2002), cara mengukur tingkat efisiensi adalah :

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Persentase capaian fisik dari program

Angka output yang dimaksud adalah persentase capaian fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Input : Persentase keuangan program

Angka input yang dimaksud adalah persentase keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Menurut Mahsun (2010) dalam (Dwinanda, 2018) kriteria efisiensi adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang atau cukup efisien
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efisien atau sangat efisien

C. Efektivitas

Efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2002), cara mengukur tingkat efektivitas adalah :

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Menurut Mahsun (2006) dalam (Dwinanda, 2018) kriteria efektivitas adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat efektif

3.3.2 Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan gambaran yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar, dan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif. Data ini diperoleh langsung dari subjeknya, namun masih harus dilakukan pengolahan lebih lanjut mengenai data target dan realisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data-data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dan tidak di publikasikan ke khalayak umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari segala informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, buku-buku, atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya. Laporan yang diolah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui metode value of money dengan melihat 3 elemen, yaitu elemen ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dari pengukuran elemen ini, kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan lalu melakukan analisa dari hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sudah baik atau belum. Data-data untuk menghitung ketiga elemen ini didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau terletak di pusat kota Pekanbaru, yang berlokasi di Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau JL. Jend. Sudirman No. 462, Riau 28121.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang professional dalam pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi sebagai sumber pengetahuan dan informasi untuk mencapai sumber daya manusia Riau yang berkualitas menunjang visi Riau 2020”. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau juga memiliki 6 misi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
2. Peningkatan pelayanan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi kepada masyarakat
3. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat serta pentingnya nilai guna arsip
4. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
5. Peningkatan upaya-upaya pembinaan dalam rangka pemantapan pengelolaan perpustakaan arsip dan dokumentasi

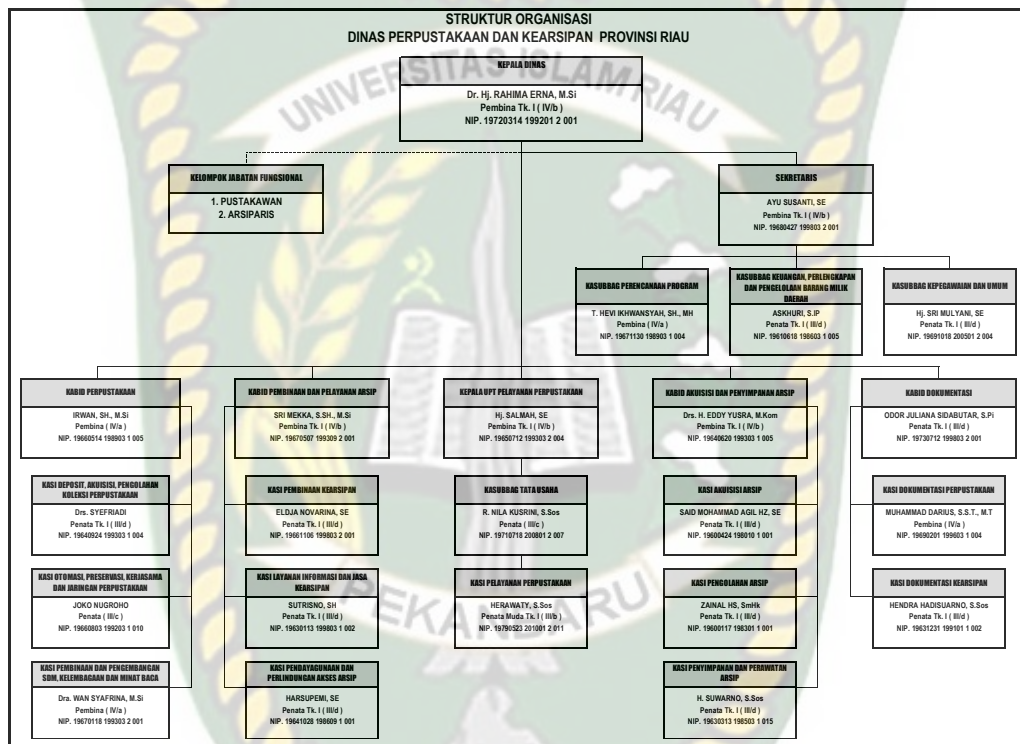
6. Peningkatan upaya dokumentasi pada usaha pembangunan Provinsi Riau

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 83 Tahun 2016 dalam Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas sesuai pasal 3 ayat 2, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan 5 fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang perpustakaan, bidang pembinaan dan pelayanan arsip, bidang akuisisi dan penyimpanan arsip dan bidang dokumentasi;
2. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang perpustakaan, bidang pembinaan dan pelayanan arsip, bidang akuisisi, dan penyimpanan arsip dan bidang dokumentasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang perpustakaan, bidang pembinaan dan pelayanan arsip, bidang akuisisi, dan penyimpanan arsip dan bidang dokumentasi;
4. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang perpustakaan, bidang pembinaan dan pelayanan arsip, bidang akuisisi, dan penyimpanan arsip dan bidang dokumentasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau



Sumber : LKJIP Dinas Perpustakaan dan Provinsi Riau 2019

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Pelayanan Perpustakaan, Bidang Akusisi dan Penyimpanan Arsip, Bidang Dokumentasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional (Perpustakawan dan Arsiparis). Bidang Sekretaris terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Bidang Perpustakaan terbagi atas seksi, yaitu Seksi Deposit, Akuisisi, dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan, Seksi Otomasi, Preservasi, Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan, dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Minat Baca. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip terbagi atas 3 seksi, yaitu Seksi Pembinaan Kearsipan, Seksi Layanan Informasi dan Jasa Kearsipan, dan Seksi Pendayagunaan dan Perlindungan Akses Arsip. Bidang Pelayanan Perpustakaan terbagi 2 seksi, yaitu Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelayanan Perpustakaan. Bidang Akuisis dan Penyimpanan Arsip memiliki 3 seksi, yaitu Seksi Akuisis Arsip, Seksi Pengolahan Arsip, dan Seksi Penyimpanan dan Perawatan Arsip. Bidang Dokumentasi memiliki 2 seksi, yaitu Seksi Dokumentasi Perpustakaan dan Seksi Dokumentasi Kearsipan.

4.2 Hasil Perhitungan *Value for Money* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau memiliki program – program setiap tahunnya. Pada setiap program, terdapat kegiatan yang harus di laksanakan setiap tahunnya. Setiap program membutuhkan anggaran agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Setiap pertanggungjawaban kegiatan ditulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Di dalam LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, terdapat 9 program yang dijalankan pada tahun 2018. Berikut merupakan nama program dengan kegiatannya masing – masing.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Tahun 2018

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan - Penyediaan Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT di UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Publikasi Perpustakaan

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Tahun 2018 (Lanjutan)

5	Program Pengembangan Perpustakaan	- Pengadaan Bahan Perpustakaan Soeman HS - Preservasi Bahan Pustaka - Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Penulisan Autobiografi Tokoh Perempuan Riau - Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan
6	Program Pembinaan Perpustakaan	- Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Eksistensi (Perpustakaan Keliling)
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	- Pengolahan Arsip Inaktif - Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau - Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kabupaten/Kota - Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan - Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	- Penelusuran dan Alih Media Naskah – Naskah Kuno di Kabupaten/Kota - Akuisis Arsip Daerah
9	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

Sumber : LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2018

Program pelayanan administrasi memiliki 13 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki 4 kegiatan, program peningkatan disiplin aparatur memiliki 1 kegiatan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki 1 kegiatan, program pengembangan perpustakaan memiliki 6 kegiatan, program pembinaan perpustakaan memiliki 1 kegiatan, program perbaikan sistem administrasi kearsipan memiliki 5 kegiatan, program

penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah memiliki 2 kegiatan, dan program pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan memiliki 1 kegiatan.

Pada tahun 2019, terdapat 10 program yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Berikut merupakan nama program beserta kegiatannya.

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Tahun 2019

No.	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, da Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyedia Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Penyediaan Makan dan Minuman - Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeiharaan Infrastruktur Perangkat IT dan UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS - Pengamanan Aset Milik Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Tahun 2019 (Lanjutan)

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Pendidikan dan Pelatihan Formal - Publikasi Perpustakaan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Penyusunan Rencana Strategis (RESERNTRA) SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD
6	Program Pengembangan Perpustakaan	- Preservasi Bahan Pustaka - Penyusunan Ranperda Pengolahan dan Penyelenggaraan Perpustakaan - Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Pembuatan <i>ID Card</i> Anggota Perpustakaan - Pengolahaa Koleksi Perpustakaan - Penelusuran, Digitalisasi Bahan Perpustakaan (<i>Centre of Excellence</i>) Koleksi Budaya Lokal Se-Sumatera
7	Program Pembinaan Perpustakaan	- Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling) - Peningkatan Kerjasama Perpustakaan yang Di Akreditasi - Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan Sekolah Se-Riau
8	Program Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan	- Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD) - Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau - Peningkatan Pengetahuan Kearsipam Kabupaten/Kota - Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan - Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan
9	Program Penyelamatan dan Pelestaria Dokumen/Arsip Daerah	- Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) - Pembuatan Dokumentasi Perpustakaan Kabupaten/Kota - Akuisisi Arsip Daerah

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Tahun 2019 (Lanjutan)

10	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
----	---	---

Sumber : LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019

Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki 12 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki 5 kegiatan, program peningkatan disiplin aparatur memiliki 1 kegiatan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki 2 kegiatan, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 3 kegiatan, program pengembangan perpustakaan memiliki 6 kegiatan, program pembinaan perpustakaan memiliki 3 kegiatan, program perbaikan sistem administrasi kearsipan memiliki 5 kegiatan, program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah memiliki 3 kegiatan, dan program pemeliharaan rutin sarana dan prasaran kearsipan memiliki 1 kegiatan.

Terdapat 3 elemen dalam perhitungan *value for money* , yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mardiasmo (2002), cara mengukur tingkat ekonomis adalah :

$$Ekonomis = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

dimana input merupakan realisasi anggaran dan nilai input merupakan anggaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Berikut merupakan perhitungan elemen ekonomis pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.710.500	8.000.000	96,38%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.414.273.140	1.549.440.000	91,28%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.497.060	18.000.000	69,43%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	391.976.602	400.000.000	97,99%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.935.000	20.900.000	61,89%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	135.324.400	135.993.200	99,51%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	73.023.150	73.505.000	99,34%
		Penyediaan Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.805.000	30.000.000	52,68%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.368.800	57.270.000	77,47%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100.815.000	150.000.000	67,21%

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	90.000.000	90.000.000	100%
		Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor	1.482.560.000	1.489.920.000	99,51%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	218.723.266	225.000.000	97,21%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	54.417.245	63.112.000	86,22%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.325.000	41.800.000	53,41%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	125.504.000	149.130.000	84,16%
		Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT di UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS	54.000.000	120.000.000	45,00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	6.000.000	8.500.000	70,59%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Publikasi Perpustakaan	92.530.000	112.170.000	82,49%

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
5	Program Pengembangan Pustaka	Pengadaan bahan pustaka perpustakaan Soeman HS	14.876.700	135.096.800	11,01%
		Preservasi Bahan Pustaka	16.773.600	50.000.000	33,55%
		Pengembangan minat dan Budaya Baca	297.862.600	312.283.100	95,38%
		Penulisan Autobiografi Tokoh Perempuan Riau	179.113.400	247.270.000	72,44%
		Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	62.500.000	76.200.000	82,02%
		Pengolahan Koleksi Perpustakaan	8.750.000	15.000.000	58,33%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Eksistensi (Perpustakaan Keliling)	11.068.600	12.078.000	91,64%
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD)	65.039.249	82.735.200	78,61%
		Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau	61.017.900	74.758.600	81,62%
		Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/Kota	25.019.200	137.682.000	18,17%
		Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan	94.399.000	101.294.000	93,19%

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan	117.193.383	146.615.600	79,93%
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Penelusuran dan Alih Media Naskah-naskah Kuno di Kab/Kota	134.117.500	141.125.700	95,03%
		Akuisisi Arsip Daerah	54.919.600	119.996.200	45,77%
9	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	60.216.000	82.400.000	73,08%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 33 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 1 kegiatan dengan nilai ekonomis sebesar 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan ekonomis pada kegiatan di tahun 2019. Berikut perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.136.500	8.000.000	76,71%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.446.809.437	1.791.584.800	80,19%

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	37.595.180	53.000.000	70,93%
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	396.728.860	400.000.000	99,18%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.065.000	20.900.000	91,22%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	137.088.000	137.793.200	99,49%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.123.100	69.905.000	94,59%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	100,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.547.000	37.270.000	98,06%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	99.275.000	100.000.000	99,28%
		Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor	1.576.320.000	1.576.320.000	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	279.886.935	280.820.000	99,67%
2	Program Peningkatan Sarana dan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	57.631.132	63.112.000	91,32%

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
	Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8.719.726	41.800.000	20,86%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	138.068.400	149.130.000	92,58%
		Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT dan UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS	69.997.800	70.000.000	100%
		Pengamanan Aset Milik Daerah	8.650.000	8.650.000	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	6.500.000	8.500.000	76,47%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	11.210.000	26.000.000	43,12%
		Publikasi Perpustakaan	97.000.000	98.000.000	98,98%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Kerja SPKD	18.032.200	18.210.000	99,02%
		Penyusunan Rencana Strategis (RESENTRA) SKPD	17.353.500	17.720.000	97,93%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD	48.961.500	49.000.000	99,92%

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
6	Program Pengembangan Perpustakaan	Preservasi Bahan Pustaka	49.703.500	50.000.000	99,41%
		Penyusunan Ranperda Pengolahan dan Penyelenggaraan Perpustakaan	48.699.240	52.502.000	92,76%
		Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra)	300.783.100	312.283.100	96,32%
		Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	11.000.000	126.200.000	8,72%
		Pengolahan Koleksi Perpustakaan	15.000.000	15.000.000	100%
		Penelusuran, Digitalisasi Bahan Perpustakaan (<i>Centre Of Excellence</i>) Koleksi Budaya Lokal se-Sumatra	94.210.704	100.000.000	94,21%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling)	13.666.900	21.078.000	64,84%
		Peningkatan Kerjasama Perpustakaan yang di Akreditasi	40.609.800	48.700.000	83,39%
		Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan Sekolah se-Riau	27.227.400	34.750.000	78,35%

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengolahan Arsip Inaktif	67.146.000	70.000.000	95,92%
		Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau	50.084.500	65.000.000	77,05%
		Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/Kota	59.926.228	75.000.000	79,90%
		Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan	59.604.000	66.294.000	89,91%
		Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan	88.532.602	100.000.000	88,53%
9	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (Sistem)	35.884.400	40.000.000	89,71%
		Pembuatan Dokumentasi Perpustakaan Kabupaten/Kota	48.624.000	50.000.000	97,25%
		Akuisisi Arsip Daerah	68.558.400	75.000.000	91,41%
10	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	64.811.000	65.000.000	99,71%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.4, terdapat 36 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 5 kegiatan dengan nilai ekonomis sebesar 100%.

Elemen *value for money* kedua adalah efisiensi, menurut Mardiasmo (2002), cara mengukur tingkat efisiensi adalah :

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

dimana *output* merupakan persentase capaian fisik kegiatan dan *input* merupakan persentase capaian keuangan yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018. Berikut merupakan perhitungan elemen efisiensi pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
1	Program Pengembangan Pustaka	Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS	100%	11,01%	908,27%
		Preservasi Bahan Pustaka	88,33%	33,55%	263,28%
		Pengembangan minat dan Budaya Baca (Layanan Extra)	97,50%	95,38%	102,22%
		Penulisan Autobiografi Tokoh Perempuan Riau	92,14%	72,44%	127,19%
		Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	100%	52,49%	190,51%

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Pengolahan Koleksi Perpustakaan	86,67%	58,33%	148,59%
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Eksistensi (Perpustakaan Keliling)	75%	83,36%	89,97%
3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD)	85%	100%	85%
		Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau	84,55%	81,62%	103,59%
		Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/Kota	87%	18,71%	478,81%
		Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan	92,82%	93,19%	99,60%
		Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan	94,17%	94,17%	100%
4	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Penelusuran dan Alih Media Naskah-naskah Kuno di Kab/Kota	97,50%	95,03%	102,60%
		Akuisisi Arsip Daerah	62,41%	61,04%	102,24%
5	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	90,35%	96,15%	93,97%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.5, terdapat 4 kegiatan dengan nilai efisiensi dibawah 100%, 1 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%, dan 10 kegiatan dengan nilai efisiensi lebih dari 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan efisiensi pada kegiatan di tahun 2019. Berikut perhitungan efisiensi kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	76,71%	130,36%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	79,93%	125,11%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	70,93%	140,98%
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	100%	99,18%	100,83%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	91,22%	109,63%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	99,49%	100,51%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	94,59%	105,72%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100.00%

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	100%	98,06%	101,98%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	99,28%	100,73%
		Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor	100%	100%	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	100%	99,67%	100,33%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100%	91,32%	109,51%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	20,86%	479,39%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	92,58%	108,01%
		Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT dan UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS	98,71%	100%	98,71%
		Pengamanan Aset Milik Daerah	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	100%	76,47%	130,77%

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
4	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Publikasi Perpustakaan	100%	87,76%	113,95%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Kerja SPKD	100%	99,02%	100,99%
		Penyusunan Rencana Strategis (RESENTRA) SKPD	100%	97,93%	102,11%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	100%	99,92%	100,08%
6	Program Pengembangan Perpustakaan	Preservasi Bahan Pustaka	97,84%	99,41%	98,42%
		Penyusunan Ranperda Pengolahan dan Penyelenggaraan Perpustakaan	100%	92,76%	107,81%
		Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra)	100%	96,32%	103,82%
		Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	11,62%	8,72%	133,26%
		Pengolahan Koleksi Perpustakaan	94,67%	100%	94,67%
		Penelusuran, Digitalisasi Bahan Perpustakaan (<i>Centre Of Excellence</i>) Koleksi Budaya Lokal se-Sumatra	100%	94,21%	106,15%

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling)	90%	64,84%	138,80%
		Peningkatan Kerjasama Perpustakaan yang di Akreditasi	100%	80,45%	124,30%
		Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan Sekolah se-Riau	100%	70,36%	142,13%
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD)	90%	95,92%	93,83%
		Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau	100%	64,85%	154,20%
		Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/Kota	94,44%	79,90%	118,20%
		Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan	100%	88,10%	113,51%
		Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan	100%	44,37%	225,38%

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
9	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (Sistem)	100%	89,71%	111,47%
		Pembuatan Dokumentasi Perpustakaan Kabupaten/Kota	100%	97,25%	102,83%
		Akuisisi Arsip Daerah	82,93%	91,41%	90,72%
10	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	98,89%	96,02%	102,99%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.6, terdapat 5 kegiatan dengan nilai efisiensi dibawah 100%, 3 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%, dan 33 kegiatan dengan nilai efisiensi lebih dari 100%.

Elemen *value for money* ketiga adalah efektivitas, menurut Mardiasmo (2002), cara mengukur tingkat efektivitas adalah :

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

dimana *outcome* merupakan angka realisasi hasil/keluaran kegiatan dan *output* merupakan angka rencana hasil/keluaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018. Berikut merupakan perhitungan elemen efektivitas pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2282 Surat	3000 Surat	76,07%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Bulan	12 Bulan	83,33%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	8 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13 Orang	15 Orang	86,67%
		Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28 Unit	28 Unit	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	19 Jenis	20 Jenis	95%
		Penyediaan Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19 Jenis	23 Jenis	82,61%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	3 Orang	3 Orang	100%
		Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor	64 Orang	64 Orang	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	7 Unit	7 Unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2 Unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT dan UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS	4 Jenis	4 Jenis	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Publikasi Perpustakaan	1 Pameran	1 Pameran	100%
5	Program Pengembangan Pustaka	Pengadaan bahan pustaka perpustakaan Soeman HS	0 Buku	1500 Buku	0%
		Preservasi Bahan Pustaka	750 Bahan Pustaka	750 Bahan Pustaka	100%
		Pengembangan minat dan Budaya Baca (Layanan Extra)	330700 Pengunjung	80000 Pengunjung	413,38%
		Penulisan Autobiografi Tokoh Perempuan Riau	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	5000 Pcs	6000 Pcs	83,33%
		Pengolahan Koleksi Perpustakaan	1500 Bahan Pustaka	1500 Bahan Pustaka	100%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Eksistensi (Perpustakaan Keliling)	400 Kunjungan	200 Kunjungan	200%
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengolahan Arsip Inaktif	8 OPD	8 OPD	100%
		Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau	50 ASN	50 ASN	100%

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2018 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kabupaten/Kota	0 ASN	30 ASN	0%
		Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan	12 Sekolah	12 Sekolah	100%
		Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Penelusuran dan Alih Media Naskah-naskah Kuno di Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Akuisisi Arsip Daerah	12 Berkas	30 Berkas	40%
9	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	2 Lantai Depo	2 Lantai Depo	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.7, terdapat 9 kegiatan dengan nilai efektivitas dibawah 100%, 23 kegiatan dengan nilai efektivitas sama dengan 100%, dan terdapat 2 kegiatan dengan nilai efektivitas lebih dari 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan efektivitas pada kegiatan di tahun 2019. Berikut perhitungan efektivitas kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1966 Surat	3000 Surat	65,53%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 Bulan	12 Bulan	91,67%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	10 Unit	100%
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28 Unit	28 Unit	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor	67 Orang	67 Orang	100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	7 Unit	7 Unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	2 Unit	50%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT dan UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Pengamanan Aset Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	188 Orang	188 Orang	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	6 Orang	100%
		Publikasi Perpustakaan	1 Pameran	1 Pameran	100%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Kerja SPKD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyusunan Rencana Strategis (RESENTRA) SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Penyusunan Rencana Kerja SPKD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6	Program Pengembangan Perpustakaan	Penyusunan Rencana Strategis (RESENTRA) SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	28 Laporan	28 Laporan	100%
		Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra)	80235 Pengunjung	8000 Pengunjung	100,29%
		Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	0 Pcs	6000 Pcs	0%
		Pengolahan Koleksi Perpustakaan	2000 Eks	2000 Eks	100%
		Penelusuran, Digitalisasi Bahan Perpustakaan (<i>Centre Of Excellence</i>) Koleksi Budaya Lokal se-Sumatra	40 Judul	40 Judul	100%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling)	350 Kunjungan	80 Kunjungan	437,50%
		Peningkatan Kerjasama Perpustakaan yang di Akreditasi	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan Sekolah se-Riau	40 Orang	40 Orang	100%
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD)	5 OPD	5 OPD	100%
		Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau	10 OPD	10 OPD	100%
		Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/Kota	30 OSN	30 OSN	100%
		Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan	16 Sekolah	16 Sekolah	100%
		Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan	2 Peraturan	3 Peraturan	66,67%
9	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (Sistem)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Pembuatan Dokumentasi Perpustakaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau 2019 (Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Akuisisi Arsip Daerah	30 Berkas	30 Berkas	100%
10	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	2 Ruang	2 Ruang	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.8, terdapat 5 kegiatan dengan nilai efektivitas dibawah 100%, 33 kegiatan dengan nilai efektivitas sama dengan 100%, dan 3 kegiatan dengan nilai efektivitas lebih dari 100%.

4.3 Pembahasan Analisis *Value for Money* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019

Terdapat kriteria – kriteria yang ditentukan untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan elemen *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

Menurut Mahsun (2006) dalam Dwinanda (2018), kriteria ekonomis adalah sebagai berikut : (1) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan ekonomis atau sangat ekonomis, (2) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan ekonomis berimbang atau cukup ekonomis, dan (3) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak ekonomis.

Menurut Mahsun (2010) dalam (Dwinanda, 2018) kriteria efisiensi adalah : (1) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak efisien, (2) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan efisien berimbang atau cukup efisien dan, (3) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan berarti efisien atau sangat efisien.

Menurut Mahsun (2006) dalam (Dwinanda, 2018) kriteria efektivitas adalah : (1) Jika nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak efektif, (2) jika nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan efektif berimbang atau cukup efektif, dan (3) jika nilai perhitungan efektivitas lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan efektif atau sangat efektif.

Pada tahun 2018, terdapat 33 kegiatan dengan nilai perhitungan ekonomis dibawah 100. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 33 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinisi Riau telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Ini berarti bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah berhemat pada 33 kegiatannya. Selain itu, terdapat 1 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan sebesar 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 1 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada tahun 2019, 36 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan ekonomis kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, 36 kegiatan ini dinyatakan

ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dana yang dikeluarkan kurang dari anggaran yang direncanakan pada tahun 2019. Ini berarti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah berhemat dana pada 36 kegiatan di tahun 2019. Selain itu, terdapat 5 kegiatan dengan nilai perhitungan ekonomis sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 5 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.

Pada tahun 2018, terdapat 10 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, 10 kegiatan ini dinyatakan efisien. Ini menunjukkan bahwa presentasi fisik yang dilakukan untuk setiap kegiatan melebihi presentasi keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat 1 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 1 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa presentasi fisik yang dilakukan sesuai dengan presentasi keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Terdapat 4 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 4 kegiatan ini dinyatakan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa presentase fisik yang dilakukan kurang dari presentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Pada tahun 2019, terdapat 33 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi fisik kegiatan ini melebihi presentasi keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Terdapat 3 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria

efisiensi, maka 3 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa presentase fisik 3 kegiatan ini sesuai dengan presentasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat 5 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 5 kegiatan ini dinyatakan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi fisik untuk kegiatan – kegiatan ini kurang dari presentasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2018, terdapat 2 kegiatan dengan nilai perhitungan efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 2 kegiatan ini efektif. Hal ini menunjukkan realisasi hasil/keluaran kegiatan melebihi ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditentukan oleh objek. Terdapat 23 kegiatan dengan nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 23 kegiatan ini dinyatakan efektif berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran dari kegiatan ini sesuai dengan ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan oleh objek. Terdapat 9 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 9 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran kegiatan – kegiatan ini tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diinginkan oleh objek.

Pada tahun 2019, terdapat 3 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 3 kegiatan ini dinyatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realiasi hasil/keluaran dari kegiatan ini melebihi ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh objek.

Terdapat 33 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 33 kegiatan ini dinyatakan efektif berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran sesuai dengan ekspektasi hasil/keluaran yang diinginkan oleh objek. Terdapat 5 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 5 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran yang dilakukan tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diharapkan oleh objek.

Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca merupakan kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen *value for money* pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat dua kegiatan yang memenuhi 3 elemen *value for money*, yaitu Pengembangan Minat dan Budaya Baca dan Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling). Kegiatan inilah yang memiliki pengelolaan organisasi yang paling baik diantara kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi Dinas Perpustakaan dan Provinsi Riau masih belum berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya, yang mana hipotesisnya adalah akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*. Meskipun hampir semua kegiatan pada tahun 2018 dan 2019 telah ekonomis dan efisiensi, namun tidak banyak kegiatan yang bersifat efektif dan memberikan dampak signifikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Banyak kegiatan yang memiliki nilai efektivitas sama dengan 100% yang berarti dampak kegiatan tersebut tidak melebihi ekspektasi Dinas Perpustakaan dan

Provinsi Riau. Ini berarti kinerja Dinas Perpustakaan dan Provinsi Riau hanya menyesuaikan dengan target mereka tanpa berusaha untuk melewati target yang ditentukan.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pada tahun 2018 dan 2019, 92% kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau bersifat ekonomis.
2. Pada tahun 2018 dan 2019, 74% kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau bersifat efisien.
3. Pada tahun 2018 dan 2019, 7% kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau bersifat efektif.
4. Pada tahun 2018 dan 2019, hanya terdapat 1 kegiatan dan 2 kegiatan yang memenuhi elemen *value for money*. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau masih belum memenuhi prinsip *value for money*.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau diharapkan dapat mengevaluasi kembali program kegiatannya agar dapat memenuhi elemen *value for money* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari objek penelitian yang memiliki data yang lebih lengkap. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau untuk mendalami lagi informasi dan masalah dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, C., Salle, A., & Rante, A. (2018, 5). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68-82.
- Dewi, K. (2007, Agustus). Manajemen Strategik Pada Organisasi Sektor Publik. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 11(2).
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau*. Pekanbaru: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. (2018). *Laporan Kinerja Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau*. Pekanbaru: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
- Dwinanda, Y. (2018, Mei). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Efriyanti, F., Anggraini, R., & Fiscal, Y. (2012, September). Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investor Dalam Menanamkan Modal Pada PT. Bukit Asam, Tbk. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 299-316.
- Enre, D. T. (2020). *Analisis Value for Money Pada Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (Periode 2014-2019)*. Medan, Sumatra Utara, Indonesia
- Haryanto, Arifuddin, & Sahmuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inspektorat Provinsi Riau. (2019). *Laporan Evaluasi Instansi Pemerintah*. Pekanbaru: Inspektorat Provinsi Riau.
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014*. Retrieved Januari 2021, from Sumbapro: <https://sumbarprov.go.id/images/Biroumum/permenpan-53-tahun-2014-a-1.pdf>
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kinerja*. Retrieved November 23, 2020, from Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/kinerja>
- Kementrian Hukum dan HAM. (2007, November). *Perpustakaan*. Retrieved Oktober 2020, from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: <http://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/36/43-07.pdf>
- Kementrian Hukum dan HAM. (2009). *Kearsipan*. Retrieved Oktober 2020, from Kumpulan Perkara Korupsi: https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_43_Tahun_2009_Kearsipan.pdf
- Kristiyanti, M. (2012, September). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(3).

- Laoli, V. (2019, 2). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1), 91-101.
- Pratama, R. A., & Mukzam, M. D. (2018, September). Pengaruh Metode Pelatihan dan Materi Pelatihan Terhadap Kemampuan Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 62(1), 1-10.
- Presiden Republik Indonesia . (1999, 6 15). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Retrieved Januari 2021, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1047/instruksi-presiden-nomor-7-tahun-1999/document#!>
- Prihono, Budiarttha, I. K., & Astika, I. B. (2016). Pengaruh Motivasi, Budaya Organisasi dan Spiritualitas Pada Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(7), 2063-2090.
- Purwiyanti, D. (2017, Maret). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *e Jurnal Katalogis*, 5(3), 190-200.
- Putri, F. F., & Isharijadi. (2014, April). Evaluasi Kinerja Sektor Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Penerapan PNPM Mandiri Di Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). 3(1). Indonesia.
- Putri, N. Z. (2020, February 24). Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016, Maret). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014. *Jurnal EMBA*, 4(1), 982-989.
- Sanjaya, D. H. (2019, Desember). Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1-16.
- Septariani, J. (2016). Penerapan Konsep Value For Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, II(1), 158-170.
- Sipahelut, R. C., Murni, S., & Rate, P. V. (2017, September). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016). *Jurnal EMBA*, 5(3), 4425-4434.
- Sulisworo, D. (2009). *Pengukuran Kinerja*. Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Indonesia: Universitas Ahmad Dahlan.
- Trilaksono, B. A., & Handayani, N. (2020, 10). Analisis Value For Money Dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-15.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada

Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 354-361.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau